

JURNAL

ISSN : 2252 - 7842

Islam & Demokrasi

Integrasi Islam dan Sains

Sirajuddin Zar

Dilema Partai Islam dalam Pemilu di Indonesia

Asrinaldi A

Peta Kekuatan Politik Partai-Partai Islam: Persaingan dan Koalisi dalam Pemilu
di Lampung

Hertanto

Relasi Kebijakan Pemerintahan Terkait Relegius Diversity dan Kekerasan Atas
Nama Islam di Indonesia

Juharmen

Berdakwah di Kampus Biru: Kemunculan Jamaah Shalahuddin Sebagai
Lembaga Dakwah Kampus Universitas Gadjah Mada

Devi Adriyani

JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS

Volume 1

Nomor 3

April

2014

Halaman
1-106

JID

JURNAL
ISLAM DAN DEMOKRASI
Volume 1, Nomor 3, April 2014 hlm.1-106

Penanggung Jawab
Ketua Jurusan Ilmu Politik

Ketua Penyunting
Bakaruddin Rosyidi

Penyunting Pelaksana
Aidinil Zetra
Sadri Chaniago
Irawati
Andri Rusta
Zulfadli

Pelaksanaan Tata Usaha
Heru Permana Putra
Silmonalisa

Diterbitkan Oleh
Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang
ISSN: 2252-7842

Alamat Redaksi
Gedung Jurusan Ilmu Politik, FISIP Universitas Andalas
Kampus Limau Manis, Padang 25163
Telp. (0751) 71266
Fax. (0751) 71266
E-mail: Jurnal.Islamdemokrasi@gmail.com

Jurnal Islam dan Demokrasi (JID) diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Politik, terbit 2 kali setahun (April dan September). Jurnal ini menyajikan artikel dan hasil penelitian yang berhubungan dengan kajian di bidang Islam, Politik dan Demokrasi. Redaksi mengundang tulisan para praktisi dan pakar politik untuk mengirimkan naskahnya untuk dipublikasikan dalam jurnal ini. Naskah ditulis sesuai dengan format penulisan ilmiah yang telah ditentukan oleh sidang dewan redaksi.

Daftar Isi

Daftar Isi.....	3
Integrasi Islam dan Sains <i>Sirajuddin Zar</i>	5
Dilema Partai Islam dalam Pemilu di Indonesia <i>Asrinaldi A</i>	17
Peta Kekuatan Politik Partai-Partai Islam: Persaingan dan Koalisi dalam Pemilu di Lampung <i>Hertanto</i>	31
Relasi Kebijakan Pemerintahan Terkait <i>Religijs Diversity</i> dan Kekerasan Atas Nama Islam di Indonesia <i>Juharmen</i>	47
Berdakwah di Kampus Biru: Kemunculan Jamaah Shalahuddin Sebagai Lembaga Dakwah Kampus Universitas Gadjah Mada <i>Devi Adriyani</i>	87
Indeks.....	103
Petunjuk Bagi (Calon) Penulis.....	105

PETA KEKUATAN POLITIK PARTAI-PARTAI ISLAM: PERSAINGAN DAN KOALISI DALAM PEMILU DI LAMPUNG

Hertanto

*Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung dan Kandidat Doktor Sains Politik pada
Pusat Pengajian Sejarah Politik, dan Strategi FSSK, Universiti Kebangsaan Malaysia
Email: hertanto.lpg@gmail.com*

Abstract: Map of power political Islamic party: competition and coalition's election in Lampung. Islamic parties had triumphed in the trajectory of politics in Indonesia, especially in the 1955 election. Entering the authoritarian New Order era, the Islamic party that begins a drastic decline from the 1971 election and subsequent elections (1977-1997). This study aims to explain the map strength, competition, and cooperation (coalition) of Islamist parties in the elections, presidential elections, and local elections in Lampung post-New Order. The results showed a tendency of Islamic parties do not have high competitiveness compared with nationalist parties in the Parliament election results of 1999 and 2004 elections. This phenomenon indicates the prominence of narrow pragmatism aspect to pursue short-term goals.

Keywords: Political Map, the Islamic Party, Competition, Coalition, Elections

Abstrak: Peta kekuatan politik partai-partai Islam: persaingan dan koalisi dalam pemilu di Lampung. Partai-partai Islam pernah berjaya dalam lintasan sejarah politik di Indonesia, terutama dalam Pemilu 1955. Memasuki era otoritarian Orde Baru, partai Islam mengalami kemerosotan drastis yang diawali dari Pemilu tahun 1971 dan pemilu-pemilu berikutnya (1977-1997). Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan peta kekuatan, persaingan, dan kerjasama (koalisi) partai-partai Islam dalam pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilukada di Lampung pasca Orde Baru. Hasil penelitian menunjukkan kecenderungan partai-partai Islam tidak memiliki daya saing yang tinggi dibandingkan dengan partai-partai nasionalis yang ada di DPRD hasil Pemilu 1999 dan Pemilu 2004. Fenomena ini mengindikasikan menonjolnya aspek pragmatisme sempit untuk mengejar tujuan jangka pendek.

Kata kunci: Peta politik, Partai Islam, Persaingan, Koalisi, Pemilu

PENDAHULUAN

Demokrasi di negara modern tidak dapat dibangun tanpa adanya partai politik (parpol) yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi vital komunikasi politik seperti artikulasi dan agregasi kepentingan, serta rekrutmen melalui pemilu yang bebas, jujur, dan teratur; untuk menentukan siapa yang berhak memerintah suatu negara. Fungsi-fungsi lainnya meliputi perwakilan, suksesi damai, dan sosialisasi nilai-nilai demokrasi. Kelemahan pada fungsi-fungsi vital parpol akan

melahirkan sistem politik otoritarian. Pada sisi lain, kelemahan parpol pada fungsi komunikasi politik akan berakibat ditinggalkannya parpol tersebut oleh para pendukungnya. Karena itu, parpol dan pemilu merupakan prasyarat negara demokratis yang merupakan sarana bagi rakyat untuk mengungkapkan aspirasi politiknya.

Namun dalam kenyataan, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang sangat sulit ditegakkan. Sejarah membuktikan bahwa negara-negara baru atau yang sedang mengalami transisi dari sistem otoritarian kepada demokrasi harus

melakukan upaya-upaya keras untuk membangun sistem seperti itu. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah kemampuan parpol dalam mewakili rakyat, kemampuan mempengaruhi perubahan secara damai, serta kemampuan meningkatkan kesadaran politik warga negara dan kesediaan menerima tanggung jawab. Karena itu, Hagopian (Amal, 1996) menyebut parpol sebagai suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.

Dengan demikian, basis sosiologis suatu parpol adalah ideologi dan kepentingan yang diarahkan pada usaha-usaha untuk memperoleh kekuasaan. Tanpa kedua elemen itu, partai tampaknya tidak akan mampu mengidentifikasi dirinya dengan para pendukungnya. Karena itu, kualitas parpol ditentukan seberapa besar ia mampu melaksanakan fungsi-fungsinya atas dasar struktur ideologi; landasan basis massa; dan kualitas kepemimpinannya.

Partai-partai Islam pernah berjaya dalam lintasan sejarah politik di Indonesia, misalnya Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dan Partai Nahdlatul Ulama (NU) pada Pemilihan Umum (pemilu) tahun 1955 (Noer, 1988). Namun memasuki era Orde Baru, partai Islam NU, Parmusi, Perti, dan PSII mengalami kemerosotan drastis yang diawali dari Pemilu tahun 1971. Pada periode pemilu berikutnya (tahun 1977) hanya ada satu partai Islam, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), saja yang boleh mengikuti pemilu-pemilu Orde Baru (1977-1997).

Memasuki era reformasi politik pasca-runtuhnya Orde Baru, partai-partai Islam

bermunculan kembali dan yang berhasil lolos seleksi untuk mengikuti Pemilu tahun 1999 ada 12 parpol Islam dari jumlah 48 parpol yang berhak mengikuti Pemilu 1999. Namun dalam perkembangan pada era reformasi ini, kekuatan partai-partai Islam justru cenderung mengalami penurunan dukungan dalam setiap pemilu.

Provinsi Lampung sebagai bagian integral dari dinamika politik di Indonesia mengalami proses transisi politik selepas jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada 21 Mei 1998. Sejak itu, partai-partai politik berkembang secara massal sebagai cabang dari partai-partai pada tingkat nasional di Jakarta. Menjelang pemilihan umum (pemilu) tahun 1999, partai di Provinsi Lampung yang bisa ikut pemilu hanya 47 partai. Pemilu 1999 hanya menghasilkan 15 parpol yang berhak punya wakil di DPRD Tingkat I dengan peringkat lima besar, yaitu: PDI-P (27 wakil), Partai Golkar (13 wakil), PKB (8 wakil), PPP (6 wakil), dan PAN (3 wakil). Secara umum, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu 1999 sangat baik, yaitu mencapai lebih dari 90% (105,8 juta untuk DPR) dari semua jumlah pemilih yang terdaftar secara nasional.

Kajian ini membahas partai Islam di Lampung dalam interaksi dengan para pemilihnya pada pemilihan umum dan interaksi antara partai Islam satu sama lain. Dengan kata lain, membahas partai-partai politik Islam sebagai bagian yang saling mempengaruhi dalam suatu sistem. Bagaimanakah kemampuan dan peta kekuatan partai-partai Islam saling bersaing dan berkoalisi dalam pemilu dan pemilukada di Lampung?

Dengan demikian, tujuan kajian ini adalah untuk menjelaskan peta kekuatan, persaingan, dan kerjasama (koalisi) partai-partai Islam dalam pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilukada di Lampung.

METODE

Penelitian ini merupakan kajian pustaka yang lebih menitikberatkan pada analisis data sekunder. Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, dilakukan melalui studi literatur berupa telaah buku-buku. Studi literatur ini bertujuan untuk menggali berbagai informasi yang berhubungan dengan topik penelitian. Antara lain, konsep tentang pemilu, partai politik, dan sistem kepartaian.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengamati dokumen-dokumen dari Komisi Pemilihan Umum dan media massa, terutama surat kabar lokal. Studi dokumen ini bertujuan untuk menggali berbagai informasi yang berkaitan dengan hasil-hasil pemilihan umum di tingkat nasional maupun daerah (Lampung). Informasi ini diperlukan untuk menjelaskan tentang peta kekuatan partai Islam, tingkat persaingan, dan koalisi partai-partai politik.

Data dianalisis dengan menggunakan tabel-tabel untuk mendapatkan penafsiran yang tepat. Selain itu, data akan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kecenderungan-kecenderungan yang muncul sehingga akan memberikan penjelasan yang lebih komprehensif. Penyimpulan akan dilakukan dengan menjawab persoalan penelitian yang diajukan dan menghubungkan dengan asumsi dasar yang diusulkan dalam kerangka teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peta Parpol Islam di Lampung 1999-2004

Cikal bakal partai politik di Indonesia pada awal mulanya, sebelum kemerdekaan, justru banyak berasaskan Islam, seperti Syarekat Islam, Perti (Pergerakan Tarbiyah Islamiyah), dan lain-lain (Noer, 1988). Setelah kemerdekaan muncul partai Islam yang punya basis massa besar seperti Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dan Nahdlatul Ulama (NU). Di samping partai

Tabel 1. Persentase Suara yang Diperoleh Enam Partai Agama dan Empat Partai Non-Agama Utama di Berbagai Daerah Pemilihan pada Pemilu 1955

Daerah Pemilihan	Partai-partai Non-agama Utama (PNI, PKI, PSI, IPKI)	Partai-partai Muslim (Masyumi, NU, PSII, Perti)	Partai-partai Kristen
Jawa Timur	46,6	45,75	0,51
Jawa Tengah	59,53	30,27	0,84
Jawa Barat	42,3	42,1	0,28
Jakarta Raya	38,0	44,71	3,0
Sumatra Selatan	29,1	63,4	0,5
Sumatra Tengah	10,24	79,74	0,51
Sumatra Utara	26,05	45,4	14,8
Kalimantan Barat	20	41,9	0,5
Kalimantan Selatan	11,2	81,35	1,41
Kalimantan Timur	37,33	40,68	3,91
Sulawesi Utara	19,21	50,9	21,36
Sulawesi Selatan	6,51	64,3	11,41
Maluku	11,81	38,81	38,42
Nusa Tenggara Timur	6,53	17,52	58,74
Nusa Tenggara Barat	61,0	29,9	0,29

Sumber: Feith, 1999: 118.

Islam lain, PSII (Partai Serikat Islam Indonesia). Jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas (di atas 90%) beragama Islam menjadi daya tarik bagi pendirian partai-partai Islam tersebut.

Partai politik tumbuh dan berkembang selama revolusi fisik dan mencapai puncaknya pada tahun 1955, ketika diselenggarakan pemilihan umum pertama, saat itu terdapat 36 partai politik (Feith, 1999). Pemilihan umum pertama ini pada mulanya diharapkan mampu mengurangi jumlah partai tetapi harapan tersebut terbukti tidak kesampaian. Malah pemilihan umum 1955 semakin mengukuhkan komposisi partai politik dalam jumlah yang tetap besar yaitu sebanyak 27 partai yang mendapat kursi dalam parlemen.

Pada Pemilu kedua tahun 1971, peserta pemilu yang tidak mau disebut partai politik, yaitu Golongan Karya (Golkar) menguasai mayoritas mutlak, dan ini menandai masa kelam kepartaian Orde Baru yang dalam jangka panjang (sampai Pemilu 1997) masih menjadi partai dominan tanpa saingan berarti. Pertama, dalam kurun waktu 10 tahun (Pemilu 1977-1997), pada saat itu ada 3 partai politik tetapi tidak mempunyai sistem kepartaian, karena tidak ada kompetisi, atau kompetisi itu dengan segala macam cara dimatikan. Kedua, ada sistem kepartaian tetapi kedua partai yang lain PPP dan PDI (Partai Demokrasi Indonesia) berdiri jauh di luar sistem tersebut. Sistem kepartaian pada waktu itu dianggap kompetitif tetapi kompetisi adu kekuatan yang berlangsung sama sekali tidak seimbang, maka yang terjadi adalah suatu sistem kepartaian hegemonik, dengan hegemoni di tangan Golongan Karya. Artinya, sistem kepartaian itu sama sekali tidak kompetitif karena walaupun dalam bentuk banyak partai tetapi

sebenarnya berlangsung suatu sistem *one-party authoritarian* (Tamara, 1988).

Pada titik inilah kepentingan intelektual yang menjalankan modernisasi bertemu dengan kepentingan kekuatan-kekuatan anti-partai di dalam angkatan darat dan pemerintah. Di mata banyak perwira angkatan darat, sistem banyak partai yang lama — khususnya partai-partai Islam dan Komunis -- adalah faktor menentukan dalam politik Indonesia yang sejak kemerdekaan merintanginya dicapainya konsensus tentang sifat dasar dan tujuan negara serta mendorong konflik yang tidak perlu di tubuh angkatan darat sendiri (Liddle, 1994: 5).

Hasilnya, pemilihan umum 1971 pada tingkat nasional menunjukkan perolehan suara Golkar 62,8%; NU 18,7%; PNI (partai terbesar di tahun 1955) 6,9%; dan Parmusi (Partai Muslimin Indonesia, penerus Masyumi yang dilarang oleh Presiden Sukarno pada tahun 1960) 5,3%, dari jumlah 10 parpol peserta pemilu (Liddle, 1994: 10). Partai-partai Islam seperti NU (58 kursi), Parmusi (24 kursi), PSII (10 kursi), dan Perti (2 kursi) hanya memperoleh 27,79% suara atau 94 kursi dari total 400 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Adapun, peta kekuatan parpol di DPRD Lampung hasil Pemilu 1971 adalah Golkar, NU, Parmusi, dan PNI.

Kemampuan Orde Baru mulai dipersoalkan oleh tiga kekuatan masyarakat yang sedang muncul sebagai akibat dari proses perubahan masyarakat. Tiga kekuatan itu meliputi: Islam dengan segala variasinya; struktur kepentingan ekonomi yang semakin rumit, khususnya munculnya kelompok-kelompok pengusaha, intelektual dan buruh; serta bangkitnya aspirasi kedaerahan dalam bentuk baru seperti tuntutan otonomi secara luas (Amir,

2003). Puncaknya adalah runtuhnya rezim Orde Baru (21 Mei 1998) dan dimulainya babak politik baru sejak terselenggaranya Pemilihan Umum tahun 1999, yang menandai berlangsungnya Orde Reformasi.

Peta dan Persaingan Parpol Islam pada Pemilihan Umum 1999

Pada Pemilu 1999 ada 48 partai politik yang ikut bertarung dan boleh bebas berasaskan Pancasila, ideologi non-Marxis, atau Islam. Ada 12 parpol yang mengidentifikasi diri dalam asas Islam (25%) dan 32 parpol (termasuk partai-partai agama yang lainnya) mengidentifikasi sepenuhnya atau sekedarnya dengan Pancasila (Dhakidae, 2004b). Dari 12 partai Islam tersebut, dua parpol mencantumkan dua asas sekaligus, Pancasila dan Islam, yaitu Partai Nahdlatul Umah (PNU) dan Partai Kebangkitan Umat (PKU) (Svech, 1999).

Dari 48 partai yang ikut pemilu 1999 di tingkat nasional, hanya 19 partai yang berhasil memperoleh sekurang-kurangnya satu kursi di DPR. Sedangkan dari 19 partai tersebut, hanya 5 parpol yang memperoleh suara cukup berarti

untuk menjadi pemain politik utama dalam lembaga legislatif nasional (Dhakidae, 2004a). Dari peringkat perolehan jumlah suara, PDI-P pimpinan Megawati menduduki rangking pertama (33,74%); Golkar menduduki rangking kedua (22,44%); PKB menempati posisi ketiga (12,61%); PPP menduduki posisi keempat (10,71%); dan PAN menempati urutan kelima (7,12%).

Adapun di Provinsi Lampung, Pemilu 1999 menghasilkan 15 parpol yang berhak punya wakil di DPRD dengan peringkat besar: PDIP (27 wakil), Partai Golkar (13 wakil), PKB (8 wakil), PPP (6 wakil), dan PAN (3 wakil), serta parpol lainnya (Masyumi, PBB, PK, PNU, PNI-FM, IPKI, PNI-MM, PDI, PKP, PBI) yang hanya mendapatkan satu wakil (Hertanto, dkk, 2002). Jadi hanya PPP saja partai berasas Islam yang memperoleh 6 kursi, sedangkan empat partai Islam lainnya (Masyumi, PBB, PK, PNU) hanya mendapatkan satu kursi. Adapun, penduduk Lampung yang beragama Islam sekitar 95,6% (pada saat Pemilu 1999).

Tabel 2. Perolehan Suara dan Kursi Partai-partai Islam pada Pemilu 1999 di DPRD Provinsi Lampung

No	Nama Partai Politik	Suara	Kursi
1	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	264.773	6
2	Partai Keadilan (PK)	64.272	1
3	Partai Nahdlatul Umah (PNU)	63.728	1
4	Partai Bulan Bintang (PBB)	30.291	1
5	Partai Politik Islam MASYUMI	18.419	1
6	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	14.837	0
7	Partai Persatuan (PP)	13.191	0
8	Partai Kebangkitan Umar (PKU)	11.270	0
9	Partai Kebangkitan Muslim Indonesia (KAMI)	9.720	0
10	Partai Umat Islam (PUI)	9.248	0
11	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII 1905)	6.765	0
12	Partai Masyumi Baru	5.990	0
	Total	512.504	10

Sumber: Hertanto, dkk, 2002: 6-7

Peta politik tersebut merupakan perubahan total dari hasil pemilu terakhir masa Orde Baru. Pada Pemilu 1997, Golkar unggul 93,2 persen di provinsi Lampung. Perolehan Golkar merupakan angka terbesar semenjak Pemilu 1971, meninggalkan PPP di angka 4,8 persen dan PDI hanya dua persen. Namun dalam tempo dua tahun terjadi perubahan signifikan, seiring terjadinya perubahan politik di Jakarta. Dalam Pemilu 1999, Golkar hanya mendapat 19,4 persen suara dan kalah jauh dari PDI Perjuangan. Prestasi PDI tak pernah bagus, kecuali Pemilu 1982 dengan perolehan 10,6 persen. Pada Pemilu 1999, PDI Perjuangan memperoleh 40,3 persen suara—padahal dua tahun sebelumnya PDI hanya mendapat 2 persen suara. Perolehan terbesar didapat dari Tulangbawang (47 persen).

Peta politik pascapemilu 1999 di Provinsi Lampung itu memunculkan penggolongan partai-partai yang mengisi komposisi parlemen (tabel 2), sebagai berikut:

- Pertama:* Partai Islam, yaitu partai dengan asas Islam dengan basis massa Islam (PPP, PBB, PK, PNU, Masyumi, PSII, PP, PKU, KAMI, PUI, PSII 1905, dan Masyumi Baru).
- Kedua:* Partai politik dengan asas Pancasila dan mempunyai basis dominan massa Islam (PKB dan PAN).
- Ketiga:* Partai politik dengan asas Pancasila atau non-Marxis dan basis massa majemuk (PDI-P, Partai Golkar, PNI-FM, IPKI, PNI-MM, PDI, PKP, dan PBI).

Namun partai-partai Islam di Lampung kalah dalam persaingan pada pemilu 1999 ini. Dari 12 parpol berasaskan Islam yang ikut

bertarung, tidak lebih dari separuh yang berhasil mendapatkan sekurang-kurangnya satu kursi di DPRD (lihat tabel 2). Hanya PPP yang mendapatkan enam kursi yang cukup berarti, dan empat parpol lainnya yang mendapat satu kursi. Sedangkan 7 parpol Islam lainnya (PSII, PP, PKU, KAMI, PUI, PSII 1905, dan Masyumi Baru) tidak mendapatkan kursi sama sekali di DPRD.

Hasil Pemilu 1999 di Lampung menunjukkan bahwa dari 12 parpol Islam hanya memperoleh 512.504 suara (15,63%) dan hanya 5 partai (41,67% dari 12 parpol Islam atau 10,41% dari semua kontestan) yang mampu sekurang-kurangnya 1 wakil di DPRD Provinsi Lampung. Artinya hanya 10 wakil (13%) yang dimiliki partai-partai Islam dari 75 total anggota DPRD yang diandalkan untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam Lampung. Bahkan hanya dua parpol (PPP dan PBB) yang berhak untuk ikut pemilu berikutnya (2004) sebagai kontestan karena parpol-parpol Islam lainnya (PK, PNU, Masyumi, PSII, PP, PKU, KAMI, PUI, PSII 1905, dan Masyumi Baru) mengalami degradasi karena terkena *electroral threshold* (ambang batas kematian parpol sesuai undang-undang Parpol/Pemilu).

Dengan demikian, tidak banyak partai-partai politik Islam yang sukses di Lampung pada Pemilu 1999, demikian halnya partai-partai baru. Partai-partai dengan basis pemilih muslim juga tidak banyak mendapatkan dukungan, padahal penduduk Lampung beragama Islam mencapai 95,6%. PAN memperoleh 5,3% suara dengan Kota Bandar Lampung sebagai penyumbang suara terbesar (12,2%) dan menempatkannya pada posisi ketiga di bawah PDIP dan Partai Golkar serta menggeser PPP. PPP yang pada Pemilu 1997

mendapat 4,8% pada Pemilu 1999 naik menjadi 8,1%, dan Lampung Barat menjadi penyumbang suara terbesar (13,6%) dengan konsentrasi jumlah penduduk muslim terbesar di Lampung (98,6%) (Dhakidae, 2004a: 187).

PKB berada di urutan ketiga di tingkat Provinsi Lampung dengan 11,8% suara dan Lampung Timur sebagai kabupaten penyumbang suara terbesar (16,8%). Perolehan suara yang cukup besar juga didapat partai Islam dengan basis pemilih kalangan NU, yaitu PNU (2%).

Sedangkan PBB memperoleh satu persen dan PK lebih baik (1,9%) yang punya basis-basis pemilih di wilayah perkotaan.

Peta dan Persaingan Parpol Islam pada Pemilihan Umum 2004

Pemilihan Umum 2004 mengalami perubahan cukup mendasar (dalam hal aturan main) dibandingkan dengan Pemilu 1999. Pada Pemilu 2004 rakyat memilih secara langsung anggota dewan (DPR & DPRD) dan presiden, termasuk anggota lembaga baru yang bernama

Tabel 3. Perolehan suara dan kursi Partai-partai Islam pada Pemilu Legislatif (5 April 2004) di DPRD Provinsi Lampung

No.	Nama Partai Politik	Jumlah Suara	%	Perolehan Kursi
1	Partai Bulan Bintang (PBB)	69.197	1.79	-
2	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	171.228	4.41	4
3	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	68.068	1.76	-
4	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	290.796	7.51	6
5	Partai Bintang Reformasi (PBR)	121.427	3.1	4
Total		720.716	18.57	14

Sumber: KPU Lampung, 2004.

dewan perwakilan daerah (DPD). Sedangkan pada Pemilu 1999, para pemilih hanya berhak memilih partai politik bukan calonnya. Dua lusin (24) partai politik ikut bertarung dalam pemilu legislatif tahun 2004, masing-masing parpol tetap berasaskan pada Pancasila dan Islam (5 partai atau 20%), baik partai-partai lama (6 partai) maupun partai-partai baru.

Dari 24 partai yang ikut pemilu 2004 di tingkat nasional, hanya 18 partai yang berhasil memperoleh sekurang-kurangnya satu kursi di DPR. Sedangkan dari 19 partai tersebut, hanya 7 parpol yang memperoleh suara cukup berarti untuk menjadi pemain politik utama dalam lembaga legislatif nasional. Dari peringkat perolehan jumlah suara, Partai Golkar pimpinan Akbar Tanjung menduduki rangking pertama (21,58% = 128 kursi); PDI-P

pimpinan Megawati menduduki rangking kedua (18,58% = 109 kursi); PKB menempati posisi ketiga (10,57% = 52 kursi); PPP menduduki posisi keempat (8,15% = 58 kursi); Partai Demokrat pada urutan kelima (7,45% = 57 kursi); PKS pada urutan keenam (7,34% = 45 kursi); dan PAN menempati urutan ketujuh (6,44% = 52 kursi).

Adapun di Provinsi Lampung, Pemilu 2004 menghasilkan 10 parpol yang sekurang-kurangnya berhak punya satu wakil di DPRD provinsi dengan peringkat besar: Partai Golkar menduduki rangking pertama (19,95% = 16 kursi); PDI-P menduduki rangking kedua (17,47% = 13 kursi); PKS menempati posisi ketiga (7,51% = 6 kursi); PKB menduduki posisi keempat (6,88% = 6 kursi); Partai Demokrat pada urutan kelima

(6,15% = 6 kursi); dan PAN menempati urutan keenam (5,57% = 6 kursi).

Pemilu 2004 di Lampung menunjukkan terjadinya penurunan jumlah partai-partai Islam yang mendapatkan suara signifikan dan menempatkan wakil di DPRD dibandingkan Pemilu 1999. Dari lima peringkat besar parpol di tingkat provinsi, hanya PKS yang mampu menembus jajaran 5 besar, yang justru menggeser kedudukan partai Islam lain (PPP) pada Pemilu 1999. Namun dari jumlah kursi meningkat dibandingkan pemilu sebelumnya, yaitu dari 10 kursi menjadi 14 kursi (lihat tabel 3), walaupun jumlah partainya berkurang.

Hasil pemilu 2004 di Lampung hanya 5 parpol Islam yang memperoleh 720.716 suara (18,57%) dan hanya 3 parpol Islam atau 15,02% yang mampu sekurang-kurangnya punya 1 wakil di DPRD Provinsi Lampung. Artinya hanya 14 wakil (21,5%) yang dimiliki partai-partai Islam dari 65 total anggota DPRD yang bisa diandalkan untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam Lampung. Bahkan hanya 3 parpol (PKS, PPP, PBR) yang berhak untuk ikut pemilu berikutnya (2009) sebagai kontestan karena parpol-parpol Islam lainnya (PBB & PPNU) mengalami

degradasi karena terkena *electroral threshold* (ambang batas kematian parpol sesuai dengan undang-undang Parpol/Pemilu). Namun, partai-partai Islam mengalami peningkatan persentase suara (2,94%) dan kursi (8,5%) dibandingkan pemilu 1999.

Untuk sebaran suara dan kursi partai-partai Islam di Lampung, PKS memiliki basis pemilih paling merata karena PKS mampu menempatkan para wakilnya di semua kabupaten/kota. Sedangkan partai Islam lain (PPP) memiliki wakil yang hampir merata di semua kabupaten dan kota, tetapi hanya di Kabupaten Tulang Bawang yang tidak memiliki wakil di DPRD. Sementara PBR tidak memiliki wakil di Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur. Sedangkan PBB dan PPNU (waktu pemilu 1999 namanya PNU) yang tidak memiliki wakil di DPRD provinsi hanya mampu menempatkan wakilnya masing-masing di tiga kabupaten dan kota. PKS menyumbangkan suara dan kursi terbanyak (8 wakil) di Kota Bandar Lampung, dan PPP mempunyai wakil terbanyak di Kabupaten Tanggamus (6 kursi). PBR mempunyai wakil terbanyak di kota Bandar Lampung (3 kursi); PBB dan PPNU mempunyai

Tabel 4. Pemilihan Umum Presiden tahun 2004 dan Partai-partai Pendukung

NO	Nama Calon Presiden/ Wakil Presiden	Partai Pendukung Putaran I	Suara Putaran I	Partai Pendukung Putaran II	Suara Putaran II
1	Susilo Bambang Yudoyono-Yusuf Kalla	PD, PBB, PKPI	39.838.184	PD, PBB, PKPI, PKS, PKB	69.266.350
2	Megawati Sukarnoputri-Hasyim Musadi	PDIP, PBR, PDS	31.569.104	PDIP, PBR, PDS, PPP, PG	44.990.704
3	Amin Rais-Siswono Yudohusodo	PAN, PKS, PNBK, PBSB, PNIM, dll	17.392.931	-	-
4	Wiranto-Salahudin Wahid	PG, PKB	26.286.788	-	-
5	Hamzah Haz-Agum Gumelar	PPP	3.569.861	-	-
			118.656.868		114.257.054

Sumber: Komisi Pemilihan Umum RI, 2004

wakil terbanyak di Kabupaten Lampung Tengah dan Tulang Bawang, masing-masing dua kursi.

Dengan demikian, partai-partai politik Islam pun belum mencapai sukses berarti di Lampung pada Pemilu 2004. Partai-partai dengan basis pemilih muslim juga belum banyak mendapatkan dukungan, bahkan cenderung menurun. PAN yang pemilu lalu memperoleh 5,3% suara meningkat suaranya tetapi posisinya melorot menempati urutan keenam (5,57% = 6 kursi), tergeser partai baru (Partai Demokrat) bentukan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. PKB yang pada pemilu 1999 menduduki peringkat ketiga (8 wakil) tergeser pada posisi keempat (6,88% = 6 kursi) oleh PKS (PK pada pemilu 1999).

Perkembangan partai-partai Islam dari Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 belum menunjukkan prestasi seperti yang telah dicapai pada Pemilu 1955. Kekuatan politik partai-partai Islam di DPRD Lampung (secara kuantitas) masih sangat kecil untuk bisa berperan secara dominan dalam proses politik. Kelemahan ini pun

Tabel 5. Pemilihan Kepala Daerah di 5 Kabupaten/Kota di Lampung, 27 Juni 2005

No	Nama Calon Kepala Daerah	Partai Pendukung	Calon Terpilih
Kota Bandar Lampung			
1	Sjachrazad ZP-Rudi Syawal Soegiarjo	PG	
2	Nuril Hakim Y-Zamzani Yasin	PD	
3	Haryanti Sjafrin-Tarwo Kusnarno	PKB, <i>PPNUI</i> , PKPB, PNBK, dll (13 parpol)	
4	Eddy Sutrisno-Kherlani	PDIP, <i>PBR</i> , PDS, <i>PBB</i> , PPDK, PKPI	X, Terpilih pd putaran II
5	Irfan Nuranda J-Kuswandi	<i>PPP</i> , PAN	
6	Abdul Hakim-Zainal Iskandar	PKS	
Kota Metro			
1	Lukman Hakim-Djohan	PAN, <i>PPP</i> , <i>PBB</i> , PPDK	X
2	Zakaria Ahmad-Darius	PKB, <i>PKS</i>	
3	Atin Suyatie-Muhyin	PDIP	
4	Mozes Herman-Sudarsono	PD, PKPI, PNBK, PKPB	
5	Somad Muryadi-Sukisno Santa	PG	
Kabupaten Lampung Selatan			
1	Muchtar Husin-Maryanto	PAN, <i>PPP</i> , PNBK, PKPB	
2	Kiswoto-Gufron Azis Fuadi	PKS, PBR	
3	Fadhil Hakim-Emi Sunarsih	PDIP	
4	Zulkifli Anwar-Wendy Melfa	PG, PKB, PD, PSI	X
5	Syahrul Akhwan-Faturrahman	Koalisi 12 Parpol nonparlemen	
Kabupaten Lampung Timur			
1	Bahusin-A. Mujab	PDIP	
2	Mawardi H-Amin Tohari	PKB	
3	Satono-Noverisman Subing	PG, <i>PKS</i>	X
4	M. Nurdin-Syarbini S	PD, PKPB, PP	
5	M. Dawam-Supriyadi	PAN, <i>PPP</i> , <i>PBB</i> , PPDK	
Kabupaten Way Kanan			
1	Tamanuri-Bustami Zainuddin	PG	X
2	Marsidi Hasan-Erson	PAN, <i>PBB</i> , PDS, dll (10 parpol)	
3	Haris Fadilah-Darlian Pone	PKB, <i>PBR</i> , PKPB	
4	Raden Mansus-Edi Rusdianto	PDIP	

Sumber: Hertanto, diolah dari Lampung Post, edisi Mei-Agustus 2005

X = Pasangan calon terpilih

belum didukung oleh kemampuan legislasi para wakilnya sebagai anggota legislatif yang punya visi negarawan. Belum lagi dari segi kekompakan sebagai sebuah kekuatan kolektif. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa antar elit parpol Islam seringkali tidak satu persepsi dalam proses pembuatan kebijakan. Justru tingkat fragmentasi dan rivalitas di antara mereka cenderung tinggi.

Mestinya karena tidak adanya partai mayoritas tunggal di DPRD Lampung, maka partai-partai politik Islam bisa berperan sebagai penyeimbang dalam proses-proses politik serta dalam membangun koalisi strategis dengan partai-partai lain yang mempunyai basis pemilih dominan umat Islam, seperti PAN dan PKB. Tetapi peran sebagai penyeimbang dan pembentukan koalisi strategis belum terbangun dalam pola yang permanen, baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini tercermin dalam kasus pemilihan presiden langsung (pilpres) tahun 2004 dan pemilihan kepala daerah langsung (pilkada) tahun 2005.

Koalisi Parpol Islam pada Pemilu Presiden Tahun 2004 dan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2005

Integrasi antarpol Islam belum terbentuk, sehingga koalisi di antara mereka cenderung bersifat pragmatis. Parpol-parpol Islam terpecah dalam egosektarian, misalnya, pada saat pemilihan presiden 2004 (lihat tabel 4). Partai-partai Islam mengusung para ketua umumnya sendiri, seperti PPP mencalonkan Hamzah Haz dan Agum Gumelar sebagai calon presiden dan wakil presiden; PKS bergabung dengan PAN dan partai lain mencalonkan Amin Rais dan Siswono Yudohusodo; PBB bergabung dengan Partai Demokrat mencalonkan Susilo Bambang

Yudoyono dan Yusuf Kalla. PBR berkoalisi dengan PDIP dan partai dengan basis pemilih dominan umat Kristen Partai Damai Sejahtera (PDS) mencalonkan Megawati dan Hasyim Musadi.

Di level daerah Lampung, hal yang sama terjadi pada pemilihan kepala daerah di lima kabupaten/kota yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2005. Tidak ada satupun aliansi strategis dari semua partai-partai Islam yang berhak mengajukan calon kepala daerah dan wakilnya (lihat tabel 5) di setiap kabupaten/kota menjadi satu koalisi besar. Di Kota Bandar Lampung, PKS maju sendirian dengan mengusung calonnya dan berhasil masuk ke putaran kedua, namun kalah. Sementara, PPP dan PPNUI masing-masing mendukung partai lain dalam mengusung calonnya. PBR dan PBB yang bergabung dengan PDIP dan PDS berhasil memenangkan calon walikota dan wakilnya di putaran kedua (6 Agustus 2005) berhadapan dengan calon dari PKS.

Di Kota Metro, dan PBB yang bergabung dengan PAN dan PPDK berhasil memenangkan calon walikota dan wakilnya dalam satu putaran. Di Kabupaten Lampung Selatan, koalisi PKS dan PBR hanya mampu menduduki urutan kedua untuk calon bupati. Di kabupaten Lampung Timur, koalisi PPP dan PBB yang mendukung PAN dan PPDK juga gagal dalam memenangkan calon bupati dan wakilnya.

Realitas parpol-parpol Islam di Indonesia masih menunjukkan tingkat fragmentasi (perpecahan) yang tinggi, dan ke depan belum ada indikasi yang mengarah pada proses integrasi alami dalam koalisi besar sebagaimana yang pernah terjadi pada masa partai Islam Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) sebelum

pemilu 1955. Partai-partai Islam masih lemah dalam mengejawahatkan “ukhuwah islamiyah” dalam sikap dan perilaku politik para elitnya. Belum tercermin semangat bahwa sesama orang Islam adalah bersaudara dalam praktek politik, yang lebih menonjol adalah semangat bahwa politik adalah kepentingan merebut kekuasaan dan jabatan semata.

Prospek dan Tantangan Parpol Islam

Fenomena Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilihan Presiden tahun 2004, dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2005 di Lampung menunjukkan kecenderungan penurunan dukungan pemilih kepada partai-partai Islam; lemahnya pencalonan dalam mengusung kepala dan wakil kepala daerah; serta terpecahnya integrasi partai dalam koalisi mendukung calon presiden/wakil presiden dan kepala daerah/wakil kepala daerah.

Partai-partai politik berasaskan Islam belum mencapai sukses berarti di Lampung pada Pemilu 1999 dan Pemilu 2004. Partai-partai dengan basis pemilih muslim juga belum banyak mendapatkan dukungan, bahkan cenderung menurun. Pemilu 2004 di Lampung menunjukkan terjadinya penurunan jumlah partai-partai Islam yang mendapatkan suara signifikan dan menempatkan wakil di DPRD dibandingkan Pemilu 1999. Oleh karena itu, kekuatan politik partai-partai Islam di DPRD Lampung (secara kuantitas) masih sangat kecil untuk bisa berperan secara dominan dalam proses politik.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan partai Islam semakin tidak populer dan semakin menurun tingkat dukungan pemilihnya dalam pemilihan umum, yaitu: pertama, partai Islam

tidak cukup mendapat dukungan dari umat di Lampung karena sosiologi masyarakat Muslim Lampung yang bercorak majemuk (beragam) tidak terlalu menekankan formalisme atau simbolisme keagamaan. Azyumardi Azra (dalam Hamid Basyaib dan Hamid Abidin, 1999) mengatakan formalisme politik Islam lewat pendirian parpol yang secara tegas memakai simbol-simbol Islam, sejak 1955, sebenarnya tidak begitu prospektif. Partai-partai tersebut sangat sulit untuk menjadi kekuatan yang betul-betul signifikan dan menenentukan. Selama ini parpol Islam dianggap melulu menampilkan symbol-simbol keislaman, namun tak mempraktekkan etika Islam. Partai politik itu hanya ingin memanfaatkan masyarakat, bukan memberikan manfaat. Parpol tersebut hanya ingin mendapatkan apa yang mereka inginkan. Seharusnya partai-partai Islam lebih mengedepankan etika, tidak hanya pragmatis yang mengejar tujuan sesaat.

Kedua, berkembangnya pengaruh kuat pemikiran Nurcholis Madjid, Abdurrahman Wahid, Kuntowijoyo, dan Syafi'i Maarif, yang lebih ingin melihat Islam sebagai kekuatan moral daripada sebagai kekuatan politik (Marijan, 2010). Gagasan demikian dimunculkan ketika Indonesia berada di bawah otoritarianisme Orde Baru yang berusaha membangun corak sistem politik yang cenderung sekuler. Di dalam corak demikian, sistem politik aliran, khususnya yang berbasis agama, berusaha dihindari. Karena agama cenderung hanya dijadikan topeng politik bukan politik bernafaskan agama. Maka fenomena “Islam Yes, partai Islam No” yang pertama kali dibumikan oleh Nurcholis Majid pada dekade 1960-1970 berkembang pesat sebagai gerakan moral. Kemudian, partai nasionalis

pun mengakomodasi kepentingan dan kegiatan kelompok Islam. Terlepas dari motif substantif ataupun simbolis, banyak partai nasionalis ini yang membentuk majelis zikir dan kegiatan Islam lain.

Ketiga, para pemimpin Islam dianggap tidak memiliki visi dan misi bersama dalam perjuangan politik mereka. Begitu mudahnya para pemimpin umat berpindah partai hanya karena jabatan dan bantuan. Seharusnya mereka membangun wadah partai Islam yang mampu menyatukan perbedaan pandangan dalam satu kesatuan tujuan politik bersama umat Islam. Alih-alih berbenah, parpol Islam justru ikut jatuh saat parpol lain terjerat masalah. Belakangan ini isu korupsi telah banyak menjatuhkan pamor partai. Kejahatan korupsi yang sangat bertentangan dengan Islam seharusnya dicontohkan oleh parpol Islam. Namun pada kenyataannya, politikus dari parpol Islam pun terjatuh pada kesalahan yang sama. Kasus korupsi merata menimpa parpol. Ini dianggap mengindikasikan tidak satu pun parpol yang bertujuan menyejahterakan rakyat Indonesia melalui kader-kadernya di parlemen.

Dengan demikian, beberapa kelemahan partai Islam di mata para pemilih antara lain meliputi asas partai. Asas Islam dianggap mempersempit basis pendukung dan mengarahkan ke dalam tingkat persaingan rekrutmen yang ketat dengan sesama partai-partai Islam. Apalagi wilayah isu yang berkembang cenderung normatif konservatif dan kurang menyentuh isu-isu aktual dalam masyarakat seperti pengangguran, kemiskinan, dan kesejahteraan (Madjid, 1993). Ideologi-ideologi parpol cenderung diingkari oleh para elitnya sendiri karena sebagian perilaku elit politik lebih dipengaruhi oleh ideologi kekuasaan yang

cenderung lebih mengejar kepentingan sesaat daripada kepentingan publik bervisi masa depan.

Kelemahan lain menyangkut organisasi dan kepemimpinan partai-partai Islam. Hampir semua partai Islam mempunyai organisasi yang terstruktur, tetapi belum memiliki disiplin kuat sebagai partai kader, dan masih sangat mengandalkan figur kepemimpinan kharismatis (*solidarity makers*) semata-mata. Interaksi organisasi dalam membangun jaringan komunikasi politik dan aliansi dengan kalangan LSM, Ormas, kelompok bisnis, media massa, elit lokal, dan lain-lain juga masih lemah.

Namun ada beberapa kelebihan yang dimiliki partai-partai Islam dalam perkembangan politik Indonesia saat ini dan di masa mendatang. Visi dan komitmen yang dikembangkan perlu lebih mampu membaca situasi dan kondisi masyarakat dan sistem politik yang sedang berkembang. Pertama, ideologi partai dimana asas Islam mengarahkan orientasi organisasi ke dalam kesamaan struktur masyarakat Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Situasi masyarakat nuslim saat ini menurut Kuntowijoyo (Kaisiepo, 2000) tergolong masih pada level "ideologis" dimana dukungan massa pada parpol hanya bisa diperoleh melalui pemanfaatan simbol-simbol budaya dan agama, terutama golongan santri. Misalnya, para kader PKS menganggap mendukung partainya adalah "ibadah" (Alfan, 2005: 6). Apalagi rakyat Indonesia cenderung masih memiliki budaya politik paternalistik dan sulit bergeser pilihan politiknya dari satu partai ke partai lain dalam pemilu (Sundhaussen, 1996).

Kedua basis massa, dimana konstituen partai-partai Islam relatif homogen, tetap, dan tidak mudah bergeser. Mereka antara

lain kalangan santri perdesaan dan perkotaan, generasi muda golongan menengah Islam dengan tingkat pendidikan relatif tinggi (di kampus dan masjid), serta basis pemilih kultural merupakan pendukung fanatis dalam setiap pemilu. Basis massa ini sangat relevan untuk daerah-daerah Luar Jawa, khususnya Sumatera, yang merupakan bagian dari rumpun etnis "Melayu" dan identik dengan budaya masyarakat Islam. Penduduk Lampung beragama Islam mencakup 95%.

Ketiga, citra parpol bersih yang mengusung nilai-nilai moral bagi kalangan parpol Islam mestinya punyai nilai jual tinggi dalam situasi dan kondisi saat ini yang ditandai maraknya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), serta tidak berkembangnya etika politik.

Namun dalam kenyataan, partai-partai Islam mengalami penurunan dalam rentang dua pemilu 1999-2004, dan diduga akan mengalami hal yang sama pada pemilu-pemilu yang akan datang. Oleh karena itu, semakin berkurangnya partai-partai Islam yang mampu bersaing dari pemilu ke pemilu perlu menjadi pertimbangan dalam membentuk aliansi dan koalisi internal parpol-parpol Islam, seperti UMNO di Malaysia atau seperti Masyumi sebelum Pemilu 1955.

Partai Islam juga harus mampu mengoperasionalkan basis ideologi yang mampu menjelaskan secara eksplisit mengenai perubahan sosial dan ekonomi ke dalam program-program aksi yang mendorong berkembangnya manajemen partai dan disiplin organisasi yang ketat. Sehingga mampu menampilkan wajah partai agama yang solutif sesuai dengan menguatnya isu-isu sosial, ekonomi, dan politik global; demokratisasi; HAM; dan pembangunan berwawasan lingkungan.

Partai Islam perlu menyikapi dan mengantisipasi tumbuhnya generasi baru yang semakin terdidik, memiliki akses pada informasi yang tak terbatas, lebih rasional, dan kritis, yang menjadikan hubungan antara partai dengan massa pendukungnya di masa depan tidak lagi dibina dan dipelihara melalui simbol-simbol ideologis, melainkan oleh kemampuan menangkap, mengolah, dan menyajikan isu-isu publik yang aktual dan relevan secara rasional.

Tidak kalah penting juga antisipasi terhadap munculnya tindakan anarkisme yang mengatasnamakan Islam sehingga berdampak pada kecemasan masyarakat dan adanya kecenderungan provokasi global tentang isu terorisme yang ditujukan terhadap kalangan dan organisasi-organisasi Islam, yang akan berpengaruh terhadap perkembangan partai-partai Islam di Indonesia.

SIMPULAN

Perkembangan partai-partai Islam dari Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 belum menunjukkan prestasi seperti yang telah dicapai pada Pemilu 1955. Kekuatan politik partai-partai Islam di DPRD Lampung (secara kuantitas) masih sangat kecil untuk bisa berperan secara dominan dalam proses politik. Oleh karena itu, partai-partai Islam memiliki daya saing yang rendah dibandingkan dengan partai-partai nasionalis yang ada di DPRD. Kelemahan ini pun belum didukung oleh kemampuan legislasi para wakilnya sebagai anggota legislatif yang punya visi negarawan. Belum lagi dari segi kekompakan sebagai sebuah kekuatan kolektif belum mampu menjadi kekuatan penyeimbang dan alternatif. Sudah menjadi rahasia umum,

bahwa antarelit dan fraksi-fraksi parpol Islam seringkali tidak mampu membangun satu persepsi dalam proses pembuatan kebijakan. Justru tingkat fragmentasi dan rivalitas di antara mereka cenderung tinggi. Partai-partai Islam masih lemah dalam mengejawahatkan "ukhuwah islamiyah" dalam sikap dan perilaku politik para elitnya.

Pola koalisi partai-partai Islam dalam pemilihan presiden 2004 dan pemilihan kepala daerah 2005 masih bersifat variatif dan yang menjadi pertimbangan adalah kepentingan politik, bukan kesamaan ideologi dan visi partai. Fenomena ini mengindikasikan menonjolnya aspek pragmatisme sempit untuk mengejar tujuan jangka pendek. Parpol Islam juga belum melaksanakan sistem rekrutmen calon-calon kepala daerah dengan sistematis dan transparan. Parpol Islam masih sekedar mengfungsikan diri sebagai kendaraan politik (*political vehicel*), dan seringkali dalam merekomendasikan figur lebih mengedepankan subyektivitas politiknya dengan memaksakan figur yang lemah secara kualitas, walupun kuat secara finansial.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfian M, M. Alfian. 2005. "Jebakan-jebakan Politik PKS". Surat Kabar Harian *Kompas*, Jumat, 29 Juli 2005, hlm. 6.
- Amal, Ichlasul (eds.). 1996. *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*. (edisi revisi). Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Amir, Zainal Abidin. 2003. *Peta Islam Politik Pasca Soeharto*. Jakarta: LP3ES.
- Dhakidae, Daniel. 1985. "Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia". Dalam Farchan Bulkin. *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- _____. 2004a. *Peta Pemilihan Umum 1999-2004*, Jakarta: Kompas.
- _____. 2004b. *Partai-partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*. Jakarta: Kompas.
- Feith, Herbert. 1999. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Hamid Basyaib dan Hamid Abidin (eds.). 1999. *Mengapa Partai Islam Kalah?* Jakarta: AlvaBet.
- Hertanto (eds.). 2002. *Evaluasi Pemilu 1999 di Lampung*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Kaisiepo, Manuel. 2000. "Menilai Corak Kepartaian Saat ini: Belum Berfungsi sebagai Institusi Politik Modern". Surat Kabar Harian *Kompas*, 28 Februari. Hlm. 7.
- Liddle, R. William. 1994. *Pemilu-pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Madjid, Nurcholish (eds.). 1993. *Aspirasi Umat Islam*. Jakarta: Leppenas.
- Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana.
- Noer, Deliar. 1988. "Islam dan Politik". *Prisma*, Nomor 5, Tahun XVII. Hlm. 4-21.
- Sundhaussen, Ulf. 1996. "Refleksi Terhadap Parpol dan Pemilu di Indonesia". *Prisma*, Nomor 8, tahun XXV, Agustus. Hlm. 3-16.

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

Swech. 1999. *Katalog Partai Peserta Pemilu 1999*. Medan: Yayasan Delapan.

Tamara, Nasir. 1988. "Sejarah Politik Islam Orde Baru". *Prisma*, Nomor 5, Tahun XVII. Hlm. 37-82.

Tjahjono, Subur. 2005. "Partai Politik Lokal, Romatisme Pemilu 1955". Surat Kabar Harian *Kompas*, Kamis, 21 Juli 2005. Hlm. 5.

Media Massa

Lampung Post. 2005. "Pasangan Calon Kepala Daerah di Lampung". Surat Kabar Harian, Bandar Lampung, edisi Mei-Agustus.